

Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kawasan Wisata (Studi Kasus pada Pantai Duta, Desa Randutatah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo)

Siti Masfufah Salsabila Rahman ¹, Hayat ², Retno Wulan Sekarsari ³.

¹ Universitas Islam Malang, Indonesia; 21901091115@Unisma.ac.id

² Universitas Islam Malang, Indonesia; hayat@unisma.ac.id

³ Universitas Islam Malang, Indonesia; sekarsari@unisma.ac.id

IDAROTUNA: Jurnal Administrative Science

Vol 6 No 1 May 2025

<https://doi.org/10.54471/idarotuna.v6i1.124>

Received: March 20, 2025

Accepted: April 25, 2025

Published: May 06, 2025

Publisher's Note: Program Study Office Administrative stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract : The purpose of this project is to implement the collaborative governance concept in trash management in the Probolinggo Regency's Duta Beach tourism region. Issues with stakeholder collaboration and waste management are the driving force for this project. Using a qualitative descriptive methodology, this study examines barriers and possibilities, plans and strategies to enhance cooperation from all stakeholders in waste management, pinpoints problems that occur, and develops solutions to maximize efficient and long-lasting cooperation. According to the study's findings, Duta Beach is implementing the Collaborative Governance concept in a very effective manner. Improvements are still required, nevertheless, as a result of a number of issues that stakeholders must work together to tackle. Less structured waste management and issues with stakeholder participation are the primary causes of difficulties. However, by enhancing the government's role in creating legislation, boosting the capabilities of Pokdarwis (Tourism Awareness Groups), and teaching and interacting with local populations, there are chances to enhance cooperation. This study presents practical solutions for efficient and sustainable trash management through a collaborative approach, as well as theoretical contributions to the growth of the literature on collaborative governance in the context of garbage management in coastal tourist zones.

Keywords: *Collaborative Governance, Waste management*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata, terutama wisata pesisir. Sumber daya alam seperti pantai dan hutan mangrove menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Probolinggo adalah Pantai Duta, yang terletak di Desa Randutatah, Kecamatan Paiton. Pantai ini memiliki keunikan tersendiri karena dikelilingi kawasan konservasi hutan mangrove yang dibangun oleh masyarakat setempat sebagai respon terhadap abrasi. Seiring berjalannya waktu, kawasan ini berubah menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi.

Namun, peningkatan jumlah pengunjung dari tahun ke tahun menimbulkan permasalahan baru, yaitu penumpukan sampah yang tidak tertangani dengan baik. Sampah yang berserakan di area wisata tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran tanah dan air. Padahal, pengelolaan sampah yang baik sangat penting untuk menjaga kelestarian kawasan wisata dan meningkatkan kenyamanan serta kepuasan wisatawan. Keberadaan sampah yang tidak terkelola dapat menurunkan citra destinasi dan mengancam keberlangsungan sektor pariwisata di daerah tersebut. Sebelumnya, pengelolaan sampah di Pantai Duta sempat ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, namun kini pengelolaan diserahkan kepada pemerintah desa dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Sayangnya, setelah pengelolaan beralih, fasilitas dan dukungan teknis dari pemerintah juga berkurang. Program-program seperti daur ulang, bank sampah, dan pelatihan pengelolaan sampah yang sempat berjalan akhirnya terhenti karena keterbatasan dana, menurunnya jumlah anggota Pokdarwis, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Hal ini menjadi tantangan besar dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif.

Meski upaya penerapan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle) telah dilakukan, implementasinya belum berjalan optimal. Beberapa faktor penghambat antara lain minimnya fasilitas, kurangnya edukasi kepada masyarakat, dan rendahnya kolaborasi antar pihak. Pokdarwis sebagai pelaksana utama pengelolaan sampah merasa kewalahan karena kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar maupun instansi terkait. Kondisi ini

menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak saja, melainkan memerlukan kerja sama lintas sektor untuk mencapai hasil yang maksimal.

Permasalahan pengelolaan sampah di kawasan wisata sebenarnya telah banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya, namun fokus pada pendekatan kolaboratif atau collaborative governance masih sangat terbatas, terutama di kawasan wisata pesisir. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan melibatkan semua pihak secara aktif dan setara, diharapkan tercipta sistem pengelolaan sampah yang lebih partisipatif, efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Pantai Duta. Penelitian ini akan menggali sejauh mana kolaborasi telah terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta solusi strategis yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan peran masing-masing pemangku kepentingan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam upaya membangun sistem pengelolaan sampah yang berdaya guna dan mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Probolinggo.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode Depth Interview (Wawancara Mendalam). Menurut (Sutopo, 2006) wawancara mendalam (In-depth Interview) merupakan proses pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian melalui sesi tanya jawab langsung antara pewawancara dan responden atau individu yang diwawancarai. Proses ini bisa dilakukan menggunakan atau tanpa pedoman wawancara, di mana peneliti dan informan terlibat dalam interaksi sosial yang relatif lama.

Depth interview memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dari informan. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih kaya dan detail mengenai pengalaman, pandangan, dan perasaan informan terkait penanganan sampah di kawasan wisata. Dengan melakukan wawancara mendalam, peneliti dapat

memahami konteks sosial, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhi Penanganan sampah. Hal ini penting untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif. Melalui wawancara, peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh pokdarwis dan mencari solusi berdasarkan pengalaman dan saran dari informan yang terlibat langsung. Dengan alasan-alasan ini, metode deskriptif dengan depth interview dianggap efektif untuk mendapatkan data yang mendalam dan komprehensif terkait fokus penelitian.

Lokasi penelitian adalah tempat sebenarnya yang bersifat luas untuk melakukan penelitian dan mendapatkan berbagai informasi terkait permasalahan. Penelitian ini dilakukan di Desa Randutatah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Sedangkan situs penelitian adalah suatu tempat penelitian yang peneliti lakukan dalam arti sempit, Dimana dalam situs penelitian ini peneliti mendapat jawaban dari apa yang di harapkan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yang bersitus di Kawasan Wisata Pantai Duta. Menurut (Riskiyah, 2024) Sumber data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian yang menjabarkan darimana peneliti akan mendapatkan data-data yang dibutuhkan kemudian untuk dapat membantu menyelesaikan penelitiannya. Sumber data yang digunakan yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti yang tentu dengan melakukan berbagai cara. Dalam penelitian ini, data primer peneliti dapatkan dari observasi langsung, dokumentasi langsung, dan wawancara langsung dengan Kepala Desa beserta Staff, PihakS wasta, Kelompok Sadar WisataDesa Randutatah, Penanggung Jawab Wisata Pantai Desa Randutatah, Pelaku usaha UMKM serta Wisatawan yang sedang berkunjung. Data Sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung, dari sumber lain. dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Data Sekunder yang berasal dari buku, jurnal terkait, website mengenai Desa Randutatah, beberapa softfile mengenai Desa Randutatah dan Wisata Pantai Duta.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan teori Collaborative Governance dan Manajemen Strategi. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang mencakup tiga tahap, yaitu reduksi data (menyaring dan menyederhanakan data), penyajian data (menampilkan data dalam bentuk yang mudah dipahami), dan penarikan kesimpulan (menentukan hasil

akhir dari analisis data). Untuk memastikan keakuratan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber (membandingkan data dari berbagai sumber) dan triangulasi waktu (mengumpulkan data pada waktu yang berbeda).

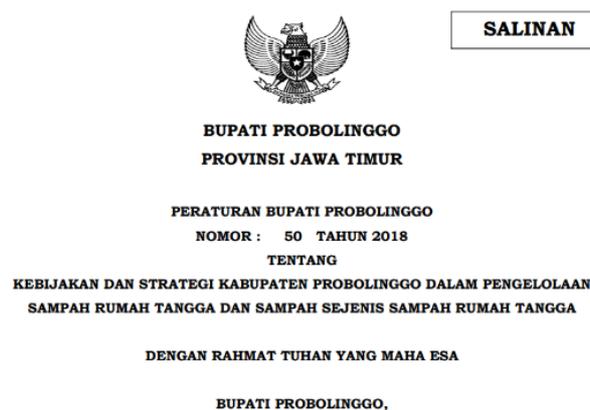
Hasil

Governance menurut (Ratner, 2012) secara umum adalah tentang bagaimana Keputusan dibuat terkait masalah kepentingan publik. *Collaborative Governance* didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor publik dan non-publik untuk mencapai tujuan bersama. Model ini melibatkan tiga tahapan utama yaitu: Identifikasi Hambatan dan Peluang, Strategi Debat untuk Mempengaruhi, dan Perencanaan Tindakan Kolaborasi (Ratner, 2012). Dalam perspektif administrasi publik, kolaborasi mengacu pada kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini sesuai dengan definisi administrasi sebagai bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih sebagai langkah dalam pencapaian tujuan. *Governance* tidak hanya melibatkan lembaga publik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mencakup keterlibatan berbagai organisasi untuk mencapai tujuan publik. (Astuti et al., 2020). Implementasi *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan melalui keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan.

Sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di rumah, tidak termasuk kotoran manusia dan jenis sampah tertentu. Sementara itu, sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang mirip dengan sampah rumah tangga, tapi berasal dari tempat seperti pusat perbelanjaan, kawasan industri, area khusus, serta fasilitas umum dan sosial. Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) adalah pedoman yang mengatur cara mengurangi dan menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya di tingkat daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. (Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 50, 2018). Pengelolaan sampah berbasis kolaborasi adalah pengelolaan sampah yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan bisa berjalan terus menerus. Pendekatan ini

mengutamakan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan partisipasi aktif dari semua pihak. Dalam konteks kawasan wisata, pengelolaan sampah yang baik sangat diperlukan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan pengunjung, serta mendukung keberlanjutan pariwisata. Di Kabupaten Probolinggo, pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 50 Tahun 2018.

Figure 2. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 50 Tahun 2018



Sumber : <https://peraturan.bpk.go.id>

Menurut Hayat (2018), kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang demi kepentingan bersama. Dalam proses kebijakan publik, setiap elemen saling memengaruhi dan tidak boleh saling melemahkan, melainkan harus saling mendukung agar kebijakan dapat berjalan dengan baik dan optimal. Dalam kebijakan tersebut mengharuskan adanya upaya pengurangan dan penanganan sampah secara terpadu. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi penerapan prinsip kolaboratif dalam pengelolaan sampah di kawasan wisata, termasuk di Pantai Duta.

Menurut (Hayat, 2018) Pelaksanaan kebijakan publik terjadi karena adanya tindakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, sehingga menghasilkan keputusan tertentu. Kebijakan ini dianggap sebagai proses yang melewati beberapa tahap, yaitu penerapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam konteks pengembangan wisata, (Pemerintah Kabupaten Probolinggo, 2023) sistem kebijakan pengelolaan sampah berfokus pada

pengembangan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dengan menerapkan tiga strategi utama, yaitu:

a. Meningkatkan kerja sama antar wilayah

Pemerintah mendorong kerja sama antar daerah dalam menangani dan mengelola masalah sampah, terutama di wilayah perkotaan. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih terorganisir dan efektif, sehingga volume sampah bisa dikendalikan dengan lebih baik.

b. Menyiapkan tempat pembuangan akhir (TPA) yang sesuai standar teknis

Pengembangan lokasi TPA harus memperhatikan persyaratan teknis, seperti sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan fasilitas yang memadai. Ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

c. Mengendalikan jumlah sampah yang dihasilkan

Pengendalian volume sampah dilakukan dengan mendorong kegiatan daur ulang, penerapan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle), dan pembuatan kompos di tingkat rumah tangga maupun tempat pengolahan sampah (TPS). Langkah ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA dan memanfaatkan kembali bahan yang masih bernilai.

Menurut Michael Polter yang dikutip oleh Rahim dan Radjab (2017), manajemen strategi adalah suatu konsep yang menjadikan keseluruhan perusahaan memiliki nilai lebih besar daripada sekadar penjumlahan bagian-bagiannya, sehingga menciptakan unsur sinergi di dalamnya. Dalam pengelolaan sampah berbasis kolaborasi di Pantai Duta, manajemen strategi digunakan untuk merumuskan solusi yang tepat dalam mengoptimalkan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Strategi yang digunakan meliputi edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah, penguatan peran Pokdarwis dalam implementasi 3R, serta peningkatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Menurut David Hunger & Thomas L. Wheelen 2012, Manajemen strategis terdiri dari 4 (empat) elemen-elemen dasar yaitu: Pemindaian lingkungan, Formulasi strategi, Implementasi strategi, Evaluasi dan kontrol strategi.

Pembahasan

Penelitian terkait Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor efektif dalam mengatasi permasalahan sampah di kawasan wisata. Namun, sebagian besar penelitian juga menghadapi masalah yang sama yaitu kurang optimalnya pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan konsep Collaborative Governance yang menekankan pada kerja sama lintas sektor untuk mengatasi permasalahan publik secara kolektif. Selain itu, tinjauan pustaka juga mencakup teori pengelolaan sampah berfokus pada prinsip (Reduce, Reuse, Recycle) serta Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 50 Tahun 2018 dan manajemen strategi dalam mengatasi hambatan. Kebaruan penelitian terdapat pada evaluasi pengelolaan sampah berbasis kolaborasi pada Kawasan wisata Pantai Duta.

Berdasarkan tinjauan Pustaka , terdapat persamaan dan perbedaan dalam pembahasan. Persamaan pada penelitian ini adalah semuanya membahas tentang pengelolaan sampah . Perbedaannya terletak pada Lokasi , tanggal, tahun, variable penelitian, serta perbedaan dalam menjawab kajian teoritis yang diajukan untuk menjawab rumusan masalah . Selain itu terdapat perbedaan dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi pada waktu pengelolaan sampah . Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah, yang melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta. Serta solusi yang dapat diterapkan menggunakan prinsip Manajemen Strategi. Pendekatan kolaboratif ini jarang diterapkan dalam studi pengelolaan sampah di kawasan wisata.

Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kawasan Wisata Pantai Duta, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di kawasan ini telah menerapkan prinsip *Collaborative Governance*, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diselesaikan. Dalam penerapan *Collaborative Governance*, terdapat tiga tahapan utama, yaitu Identifikasi Hambatan dan Peluang, Strategi Debat untuk Mempengaruhi, dan Merencanakan Tindakan Kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Pemerintah Desa, Pokdarwis, dan Pihak Swasta telah berperan dalam mengelola sampah di Pantai Duta, tetapi kolaborasi ini masih menghadapi kendala dalam koordinasi, kesinambungan kerja sama, dan belum adanya mekanisme pengelolaan yang terstruktur.

Beberapa tantangan utama dalam pengelolaan sampah di Pantai Duta meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan wisatawan dalam menjaga kebersihan pantai. Sedangkan faktor eksternal mencakup regulasi yang belum diterapkan secara optimal, kurangnya dukungan pihak swasta dan pemerintah daerah, serta pengaruh lingkungan seperti cuaca ekstrem dan sampah kiriman dari sungai.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, solusi yang dapat diterapkan, meliputi Scanning Lingkungan, Formulasi Strategi, Implementasi Strategi, serta Evaluasi dan Pengendalian. Beberapa strategi yang dapat dilakukan meliputi peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, pengadaan fasilitas pengelolaan sampah, edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan, serta memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan pemerintah daerah. Dengan diterapkannya solusi berbasis kolaborasi dan strategi manajemen yang tepat, diharapkan pengelolaan sampah di Pantai Duta dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan serta sektor pariwisata lokal.

Saran

Saran yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah dan meningkatkan efektivitas kerja sama antar pemangku kepentingan. Bagi Pemerintah Desa Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, baik dengan Pokdarwis, pihak swasta, dan pemerintah daerah, melalui pertemuan rutin untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah, menyusun regulasi yang lebih jelas terkait pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah berbasis kolaborasi. Regulasi ini perlu disosialisasikan kepada semua pihak agar implementasinya lebih efektif. Sedangkan bagi Kelompok Sadar Wisata dapat Mengadakan program edukasi dan sosialisasi bagi wisatawan dan masyarakat sekitar mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik, seperti

pemilahan sampah dan pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular, mengaktifkan kembali program daur ulang sampah seperti pembuatan kerajinan dari sampah anorganik. dan pemanfaatan sampah organik menjadi kompos untuk menambah nilai ekonomi bagi masyarakat lokal.

Pihak Swasta juga perlu meningkatkan keterlibatan dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berfokus pada pengelolaan sampah dan keberlanjutan lingkungan di Pantai Duta serta mendukung pengadaan fasilitas pengelolaan sampah. Bagi Masyarakat Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan pantai, seperti membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah sesuai jenisnya, berperan aktif dalam program lingkungan yang diselenggarakan oleh Pokdarwis atau pemerintah desa, seperti kegiatan bersih pantai, kampanye wisata ramah lingkungan, dan program bank sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa botol minum atau kantong belanja sendiri saat berkunjung ke Pantai Duta.

References

- Anggraeni, D. A. R., Ati, N. U., & Sekarsari, R. W. (2021). Kualitas pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu dalam pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). *Jurnal Administrasi Publik*, 15(6), 44–49.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arimbi, D. (2018). Optimalisasi pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kelurahan Jambangan, Surabaya. *Sepuluh Nopember Institute of Technology*.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik* (Tim DAP Press, Ed.). Program Studi Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Press.
- Chotimah, H. C., Iswardhana, M. R., & Rizky, L. (2021). Model collaborative governance dalam pengelolaan sampah plastik laut guna mewujudkan ketahanan lingkungan maritim di Kepulauan Seribu. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(3), 287–308. <https://doi.org/10.22146/jkn.69661>.
- Hayat, & Zayadi, H. (2018). *Model Inovasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*. 2(2), 137.

- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, Formulasi*. Intrans Publishing
- Hayat. (2018). *Reformasi kebijakan publik perspektif Makro dan Mikro*. (1st ed.). Prenamada Group.
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2000). Network power in collaborative planning. *Institute of Urban and Regional Development, University of California, Berkeley*.
<https://escholarship.org/uc/item/2mm270mp>
- Rahim, A. R., & Radjab, E. (2017). *Manajemen strategi*. Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ratner, B. D. (2012). *Collaborative governance assessment*. WorldFish.
- Riskiyah, K. (2024). *Pemerintah Kolaborasi dan Strategi dalam Pengelolaan Objek Wisata Desa Wringinanom (Study Kasus Pada Desa Wisata Bromo Tengger Semeru)*.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: dasar teori dan terapannya dalam penelitian* (Second Edition). Surakarta: Sebelas Maret Press.
- Untari, D. T. (n.d.). *Modul manajemen strategik matrik: Penggunaan matrik manajemen strategik sebagai tools dalam analisis strategis*. <http://repository.ubharajaya.ac.id/28643/1/Modul%20manajemen%20strategik%20matrik.Pdf>.